

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum

3. Diedarkan oleh : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
4. Diterima di penerimaan surat : Bagian Hukum

5. Dinomori Oleh : Bagian Hukum

6. Diketik Oleh : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

7. Ditaklik/dikaji oleh : Bagian Hukum

8. Diterima di pengiriman surat : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah





9. Dikirim oleh : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Hukum




Diajukan Pada Tanggal : 2022.

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Kota Bima, 2022.

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

 WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip merupakan sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap perangkat daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Bima untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Handwritten signature

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat DPAD adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah Kota Bima.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
10. Klasifikasi Kemanan adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan kemanan Negara, publik dan perorangan.
11. Akses Arsip Dinamis adalah ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
12. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
13. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
14. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
15. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
16. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
17. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
18. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat



membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.


19. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
21. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
22. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
23. Pengguna Internal adalah setiap orang yang menggunakan arsip dan berasal dari Pemerintah Kota Bima.
24. Pengguna Eksternal adalah setiap orang yang menggunakan arsip dan berasal dari luar Pemerintah Kota Bima.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan Informasi Arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk menyediakan Informasi Arsip yang dikategorikan Biasa/Terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan.



Pasal 4

Ruang lingkup sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan
- b. pengaturan Akses Arsip.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan Arsip Dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Arsip yang tercipta pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pencipta Arsip dapat diklasifikasikan menjadi Informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia;
 - b. keempat tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi Informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi Informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. publik dapat mengakses Informasi yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia dan Arsip Sangat Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi Informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi Informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Sistem Klasifikasi Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
- a. 000 umum
 - b. 100 pemerintahan
 - c. 200 politik
 - d. 300 keamanan dan ketertiban
 - e. 400 kesejahteraan
 - f. 500 perekonomian
 - g. 600 pekerjaan umum dan ketenagakerjaan
 - h. 700 pengawasan
 - i. 800 kepegawaian
 - j. 900 keuangan

BAB III


PENGATURAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 7

- (1) Pengaturan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada Pengguna Arsip yang berhak.
- (2) Pengguna Arsip yang berhak mengakses Arsip terdiri dari:
- a. Pengguna Internal yang ada di Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
 - b. Pengguna Eksternal di luar Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 8

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 2. pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 3. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas Arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Biasa/Terbuka, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti
- 

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan

- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 9

Pengaturan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar Arsip Dinamis diuraikan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lampiran I kode angka 000 bidang tugas umum;
- b. Lampiran II kode angka 100 bidang tugas pemerintahan;
- c. Lampiran III kode angka 200 bidang tugas politik;
- d. Lampiran IV kode angka 300 bidang tugas keamanan dan ketertiban;
- e. Lampiran V kode angka 400 bidang tugas kesejahteraan;
- f. Lampiran VI kode angka 500 bidang tugas perekonomian;
- g. Lampiran VII kode angka 600 bidang tugas pekerjaan umum dan ketenagakerjaan;
- h. Lampiran VIII kode angka 700 bidang tugas pengawasan;
- i. Lampiran IX kode angka 800 bidang tugas kepegawaian; dan
- j. Lampiran X kode angka 900 bidang tugas keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan Informasi Arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan, seperti pemasangan kamera pengawas/*Closed Circuit Television* (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan Informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori Arsip Biasa/Terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. kategori Arsip Terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan
 - c. kategori Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia disimpan pada lemari besi.

- (4) Pengamanan fisik dan Informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan Informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh arsiparis dan/atau petugas Kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi Arsip.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 September 2022

WALIKOTA BIMA, ✓


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 20 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

✓

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 36 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

I. UMUM

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
001	Lambang Garuda Bendera Kebangsaan Lagu Kebangsaan Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
002	Tanda kehormatan / penghargaan untuk Pegawai lihat 861.1 Bintang Satyalencana Samkarya Nugraha Monumen Penghargaan secara adat Penghargaan lainnya		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
003	Hari Raya/ Hari Besar Hari Besar Nasional 17 Agustus Hari Pahlawan dan sebagainya Hari Raya Keagamaan Hari Ulang Tahun Hari-hari Besar Internasional		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
004	Ucapan Ucapan Terima kasih Ucapan Selamat Ucapan Bela sungkawa Ucapan lainnya		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
005	Undangan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
006	Tanda Jabatan Pamong Praja		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Tanda Pengenal					
.2	Pejabat lainnya					
.3						
007	Himbauan/ Seruan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM				
		Gedung Kantor termasuk instalasi Prasarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
011	Fisik Pamong / Kantor Dinas		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
012	Rumah Dinas		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Tanah Untuk rumah dinas					
.2	Perabot Rumah Dinas					
.3	Rumah Dinas Golongan 1					
.4	Rumah Dinas Golongan 2					
.5	Rumah Dinas Golongan 3					
.6	Rumah/ Bangunan Lainnya					
.7	Rumah Pejabat Negara					
013	Mess/ Guest House / Asrama		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
014	Rumah Susun / Apartemen		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
015	Penerangan Listrik / Jasa Listrik		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

X

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
016	Telepon / Faximili / Internet		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
017	Keamanaan / Keteriban Kantor		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
018	Kebersihan Kantor		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
019	Protokol		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Upacara Bendera					
.2	Tata Tempat					
.21	Pemasangan Gambar Presiden / Wapres					
.3	Audienasi / menghadap pimpinan					
.4	Alamat- alamat kantor Pejabat					
.5	Bandir / umbul-umbul / Spanduk					
3	020	PERALATAN				
.1	Penawaran		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.21	Alat Tulis		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.22	Mesin Kantor		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.23	Perabot Kantor		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.24	Alat Angkutan		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.25	Pakaian Dinas		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.26	Senjata	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.27	Pengadaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.28	Inventaris, Ketata usahaan barang (Kartu Inventaris Barang/ Kartu Inventaris Ruangan)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
4	030	KEKAYAAN DAERAH	Biasa/ Terbuka	Eselon III		Bidang Teknis
		Meliputi: Barang bergerak dan barang tidak bergerak			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	032	Aset Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, KEARSIPAN DAN SANDI				
	041	Perpustakaan Umum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1					
	.2	Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.3	Perguruan Tinggi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.4	Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S	A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
.5	Keliling			Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
042	Dokumentasi			Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
043	Sosialisasi/ Bimbingan Teknis			Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
045	Kearsipan			Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Pola Klasifikasi						
.2	Penataan Berkas						
.3	Penyusutan Arsip						
.31	Jadwal Retensi Arsip						
.32	Penindahan Arsip						
.33	Penilaian Arsip						
.34	Pemusnahan Arsip						
.35	Penyerahan Arsip						
.36	Berita Acara Penyusutan Arsip						
.37	Daftar Pencarian Arsip						
.4	Pembinaan Kerasipan						
.41	Bimbingan Teknis						
.5	Pemeliharaan/ Perawatan Arsip						
.6	Pengawetan / Fumigasi						
046	Sandi			Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
047	Website			Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
048	Pengelolaan data			Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
049	Jaringan Komunikasi data			Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
6	050	PERENCANAAN					

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.1	Repelita/ 8 Sukses		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.11	Pelita Daerah					
.12	Bantuan Pembangunan Daerah					
.13	Bappeda					
051	Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan disini: Proyek Prasarana fisik pemerintahan, Oroyek Prasarana Fisik Pemerintahan, Tambahan Perincian 100 pada 051 Contoh: Proyek Kependaraan 051.86		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
052	Bidang Politik		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	Bidang Keamanan Dan dan Keteriban Tambahan (Tambahan Rincian 200 pada 052)					
053	Bidang Keamanan/ Ketertiban (Tambahan Rincian 300 pada 053) Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.311		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
054	Bidang Kesejahteraan Rakyat (Tambahan Rincian 400 pada 054) Contoh: Proyek Resetlement Desa 054.671		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
055	Bidang Perekonomian (Tambahan Rincian 500 pada 055) Contoh: Proyek Pasar 055.112		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
056	Bidang Pekerjaan Umum /Ketenagaan (Tambahan Rincian 600 pada 056) Contoh: Proyek Jembatan 056.3		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
057	Bidang Pengawasan (Tambahan Rincian 700 pada 057)		Biasa/ Terbuka Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
058	Bidang Kepegawaian (Tambahan Rincian 800 pada 058)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
059	Bidang Keuangan (Tambahkan Rincian 900 pada 059)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
7	060	ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN				
	.1	Program Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
061	Organisasi Instansi Pemerintah (Struktur Organisasi)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Susunan dan Tata Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.2	Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
062	Organisasi Badan Non Pemerintah		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
063	Organisasi Badan Internasional		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
064	Organisasi Semi Pemerintah, BKS- AKSI		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
065	Ketatalaksanaan/ Tata naskah/Sistem		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
066	Stempel Dinas		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
067	Pelayananaan Umum/Pelayanan Publik/ Analisis		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
068	Komputerisasi/ Siskomdagri		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
069	Standar Pelayanan Minimal		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
071	Riset		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
072	Survei		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
073	Kajian		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
075	Kementerian Lainnya		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
076	Non Kementerian		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
077	Provinsi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
078	Kabupaten/Kota		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
094		Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
095		Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
096		Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden ke luar Negeri	-	-	-	-
097		Perjalanan Menteri ke luar Negeri	-	-	-	-
098		Perjalanan Pejabat Tinggi ke luar Negeri	-	-	-	-
099		Perjalanan Pegawai ke luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA



MUHAMMAD LUTFI





II. PEMERINTAHAN

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	100	PEMERINTAHAN Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Yudikatif Hubungan Luar Negeri				
	101		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	102	GDN	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
2	110	PEMERINTAH PUSAT				
	111	Presiden Meliputi: Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR Amanat Presiden/ Amanat kenegaraan/Pidato Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato	-	-	-	-
	112	Wakil Presiden Pertanggungjawaban Wakil Presiden kepada MPR	-	-	-	-
	.2	Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/ Pidato				

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	113	Susunan Kabinet	-	-	-	-
	.1	Reshuffle	-	-	-	-
	.2	Penunjukan Menteri <i>ad interim</i>	-	-	-	-
	.3	Sidang Kabinet	-	-	-	-
	114	Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	-
	.1	Amanat Menteri Dalam Negeri/ Sambutan	-	-	-	-
	115	Kementerian Lainnya	-	-	-	-
	116	Lembaga Tinggi Negara	-	-	-	-
	117	Lembaga Non Kementerian	-	-	-	-
	118	Otonomi/ Desentralisasi/ Dekonsentrasi	-	-	-	-
	119	Kerjasama Antar Kementerian	-	-	-	-
3	120	PEMERINTAH PROVINSI				
	.04	Laporan Daerah	-	-	-	-
	.042	Monografi Tambahan Kode Wilayah				
	.1	Koordinasi				
	.2	Instansi Tingkat Provinsi	-	-	-	-
	.21	Dinas Otonomi				
	.22	Instansi VertikalKerjasama Antar Provinsi/ Daerah				
	.23	Kerjasama Antar Provinsi/ Daerah	-	-	-	-
	121	Gubernur tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pemberhentian, Serah Terima jabatan dan sebagainya	-	-	-	-
	122	Wakil Gubernur tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentian, Serah Terima jabatan dan sebagainya	-	-	-	-

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
123		Sekretariat Wilayah tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentian, Serah Terima jabatan dan sebagainya	-	-	-	-
124		Pembentukan / Pemekaran Wilayah Pembinaan /Perubahan Nama Kepala: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gedung, Sungai, Pulau, dan Sebagainya Pemekaran Wilayah	-	-	-	-
.1 .2 .3		Forum Koordinasi lainnya	-	-	-	-
125		Pembentukan Pemekaran Wilayah	-	-	-	-
.1		Pembinaan /Perubahan Nama Kepala: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai dan sebagainya Pembentukan Wilayah Pemindahan Ibukota Perubahan Batas Wilayah Pemekaran Wilayah	-	-	-	-
.2		Pembentukan Wilayah	-	-	-	-
.3		Pemindahan Ibukota	-	-	-	-
.4		Perubahan Batas Wilayah	-	-	-	-
.5		Pemekaran Wilayah	-	-	-	-
126		Pembagian Wilayah	-	-	-	-
127		Penyerahan Urusan	-	-	-	-
128		Swapraja/ Penataan Wilayah/ daerah	-	-	-	-
4	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-
		Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan				
131		Sambutan/Pengarahan/Amanat Walikota/Wakil Walikota, Tambahkan Kode Wilayah Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah terima Jabatan.	Biasa/ Terbuka	Esseclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
132		Sekretaris Daerah Kota, Tambahkan Kode Wilayah Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah terima Jabatan.	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
134		Forum Koordinas Pemerintahan di Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1		Muspida	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.2		Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3		Forum koordinasi lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.4		Kerjasama antar Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
135		Pembentukan/ Pemekaran Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1		Pemindahan Ibukota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.2		Pembentukan Wilayah Pembantu Walikota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3		Pembagian Wilayah Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.4		Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.5		Pemekaran Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.6		Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.7		Pembentukan Ibukota Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.8		Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
136		Pembagian Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
137	Penyerahan Urusan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Sambutan/Pengarahan / Amanat		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.2	Pembentukan Kecamatan		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3	Pemekaran Kecamatan		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.4	Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.5	Pembentukan Perwakilan Kecamatan		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
5	139	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PEMERINTHAN DAN LPBJ				

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.1	Administrasi Penyusunan Program dan LPBJ		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.11	Penyusunan Anggaran		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.12	Program Tahunan		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.2	Pengendalian Pembangunan, Sarana dan Prasarane		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.21	Pembinaan Jasa Konstruksi		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.22	Standar Harga		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3	Data dan Pelaporan		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.31	Laporan DAK		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.32	Koordinasi Pembangunan		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
6	140	PEMERINTAHAN KELURAHAN				
.1	Pamong , meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal Pembentukan Pemerintahan		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
141	Pengakatan, Pemberhentian dan sebagainya		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
142	Penghasilan Pamong Kelurahan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
143	Kekayaan Kelurahan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
144	Dewan Tingkat Kelurahan, Dewan Marga, Rembug Kelurahan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
145	Administrasi Desa		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
146	Kewilayahan Pembentukan Kelurahan Pemekaran Kelurahan Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Kelurahan Perubahan Nama Kelurahan Kerjasama antar Kelurahan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa Jangsan Klasifikasikan disini, lihat 410 dengan perinciannya		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
148	Perangkat Kelurahan Kepala Kelurahan Sekretaris Kelurahan Sekretaris Kelurahan Staf Kelurahan		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
149	Dewan Kelurahan Rukun Tetangga Rukun Warga Rukun Kampung		Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
7	150	LEGISLATIF MPR/DPR/DPD				
	151	Kecanggotan MPR Pencalonan Pemberhentian Recall Pelanggaran Recall Pelanggaran Pelanggaran	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	152	Persidangan	-	-	-	-
	153	Kesejahteraan Keuangan Penghargaan	- - -	- - -	- - -	- - -

✕

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
154	Hak		-	-	-	-
155	Keargogotaan DPR Pencalonan Pengangkatan Persidangan Sidang Pleno Dengar Pendapat/Rapat Komisi		-	-	-	-
156	Reses		-	-	-	-
157	Kesejahteraan		-	-	-	-
.1	Kuangan		-	-	-	-
.2	Penghargaan					
158	Jawaban Pemerintah		-	-	-	-
159	Hak		-	-	-	-
8	160	DPRD PROVINSI				
161	Kearnggotaan		-	-	-	-
.1	Pencalonan		-	-	-	-
.2	Pengangkatan		-	-	-	-
.3	Pemberhentian		-	-	-	-
.4	Recall		-	-	-	-
.5	Meninggal		-	-	-	-
.6	Pelanggaran		-	-	-	-
162	Persidangan		-	-	-	-
.1	Reses		-	-	-	-
163	Kesejahteraan		-	-	-	-
.1	Kuangan		-	-	-	-
.2	Penghargaan		-	-	-	-
164	Hak		-	-	-	-
165	Sekretaris DPRD Provinsi		-	-	-	-
166	Badan Kelengkapan Dewan		-	-	-	-
	(Seperti: Badan kehormatan, Tim Kerja dan Kelengkapan Dewan lainnya)					
9	170	DPRD KOTA				

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
171	1	Keanggotaan	Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Pencalonan	Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.2	Pengangkatan	Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.3	Pemberhentian	Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.4	Recall	Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.5	Pelanggaran	Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
172		Persidangan/ Rapat (Meliputi: Paripurna/ Pleno, Komisi/Fraksi, Rapat lainnya, Reses)	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
173		Kesejahteraan	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.1	Keuangan	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.2	Penghargaan	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	174	Hak	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
10	176	Badan Kelengkapan Dewan Termasuk Badan Kehormatan, Tim Kerja dan Kelengkapan Dewan lainnya.	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	180	HUKUM	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Konstitusi (Meliputi: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar)	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.11	Dasar Hukum	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.12	Undang-Undang Dasar		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.2	GBHN		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3	Amnesti, Abolisi dan Grasi		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
181	Perdata		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Tanah		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.2	Rumah		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3	Utang/Piutang		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.31	Gadai		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.32	Hipotik		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.4	Notariat		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
182	Pidana		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS)		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
183	Peradilan (Peradilan Agama islam 451.6, Peradilan Perkara Tanah 593.71)		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Bantuan Hukum		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
184	Hukum Internasional		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
185	Imigrasi (Meliputi: Visa, Passport, Exit, Reentry, Lintas Batas)		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.1	Visa		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit	Bidang Teknis
.2	Pasport		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit	Bidang Teknis
.3	Exit		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit	Bidang Teknis
.4	Reentry		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit	Bidang Teknis
.5	Lintas Batas/ Batas Antar Negara		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit	Bidang Teknis
186	Kepenjaraan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
187	Kejaksanaan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
188	Peraturan Perundang-undangan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit	Bidang Teknis
.1	TAP MPR		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.2	Undang-Undang Dasar		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3	Peraturan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.31	Peraturan Pemerintah		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.32	Peraturan Menteri		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.33	Peraturan Lembaga Non Departemen		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.34	Peraturan Daerah		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.341	Peraturan Provinsi		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.342	Peraturan Kota		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			4	5	6	7
.4	Keputusan				Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.41	Menteri				Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.43	Lembaga Non Kementarian				Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.44	Gubernur				Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.45	Walikota				Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.5	Instruksi				Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.51	Presiden				Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.52	Menteri				Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.53	Lembaga Non Kementerian		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.54	Gubernur		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.55	Walikota		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
11	189	Hukum Adat				
12	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI				
	191	Perwakilan Asing	-	-	-	-
	192	Tamu Negara	-	-	-	-
193		Kerjasama dengan Negara Asing	-	-	-	-
.1	Ascan		-	-	-	-
.2	Bantuan Luar Negeri/Hibah		-	-	-	-
194	Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri		-	-	-	-
195	PBB		-	-	-	-

✕

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	196	Laporan Luar Negeri	-	-	-	-
	197	Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN	-	-	-	-

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

III. POLITIK

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2		3			5	6	7
1	200	POLITIK						
	201	Kebijakan Umum Meliputi : Kebijakan Umum di Bidang Politik baik Tingkat Pusat maupun Daerah			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	202	Orde Baru			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	203	Reformasi			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	210	KEPARTAIAN						
	211	Lambang Partai			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	212	Kartu Tanda Anggota			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
	213	Bantuan Keuangan Parpol	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
3	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	Perjuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Perintis kemerdekaan				
	.2	Angkatan 45				
	.3	Veteran				
	222	Kekarya-an	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Kekarya-an Pepabri	Terbatas	Eselon III		Bidang Teknis
	.2	Wredatama				
	223	Kegamaanan (Muhammadiyah, NU, Persatuan Tarikat Islam, dll)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	224	Lembaga Adat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	225	Lembaga Swadaya Masyarakat (Seperti: P.K.D.P, Y.L.K.I, dll)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	226	Organisasi Kemasyarakatan Lainnya Seperti: Yayasan Jantung, dll)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
4	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				

f

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
231	Organisasi Kesehatan (Seperti: IDI, IBI, dll)		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
232	Organisasi Guru (Seperti : Persatuan Guru Republik Indonesia, dll)		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
234	Persatuan Advokat Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
235	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
236	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
237	Persatuan Wartawan Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
238	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
	239	Organisasi Profesional dan Fungsional lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
5	240	ORGANISASI KEPEMUDAAN				
	241	Komite Nasional Pemuda Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	242	Organisasi Mahasiswa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	243	Organisasi Pelajar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	244	Organisasi Pemuda Ansor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	246	Gerakan Pemuda Marhaenis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	247	Dewan Pendidikan Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
	248	KONI	Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
6	250	ORGANISASI BURUH, TANI, DAN NELAYAN				
	251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia	Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	252	Organisasi Buruh Internasional	Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	253	Himpunan Kerukunan Tani	Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	255	Keluarga Sopir Proporsional Indonesia	Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
7	260	ORGANISASI PEREMPUAN				
	261	Dharma Wanita	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S	A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			5	6	7
	262	Persatuan Wanita Indonesia		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	263	Pemberdayaan Perempuan		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	264	Kongres Wanita		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	265	PKK		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	266	Kosgoro		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	267	Perwosi		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	268	GOW		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	270	PEMILIHAN UMUM					

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
	271	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	272	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	273	Kampanye	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	274	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	275	Pemilih / Daftar Pemilih	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	276	Sarana .1 TPS .2 Kendaraan .3 Surat Suara .4 Kotak Suara .5 Dana	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	277	Pemungutan suara / Penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
	278	Penetapan Hasil Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	279	Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan dan Calon Pemilih	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	280	PENGUCAPAN SUMPAH JANJI MPR, DPR, DPD				
		Pengucapan Sumpah Janji MPR, DPR, DPD	-	-	-	-

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	300	KEAMANAN/KETERTIBAN				
	301	Keamanan Perbatasan Provinsi Kab/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	302	Keterlibatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	310	PERTAHANAN				
	311	Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	312	Laut	-	-	-	-
	313	Udara	-	-	-	-
	314	Perbatasan	-	-	-	-
3	320	KEMILITERAN				
	321	Latihan Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	322	Wajib Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	323	Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	324	Kekarya TNI/Pejabat Sipil dan TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
4	330	KEAMANAN				
	331	Kepolisian	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	.1	Polisi Pamong Praja				
	.2	Kamra				
	.3	Kamling				
	.4	Jaga Wana				
	332	Huru hara/ Demontrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	333	Senjata Api Tajam	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	334	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	335	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	336	Surat- surat Kaleng	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	337	Pengaduan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	338	Himbauan / Larangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	339	Teroris	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	Perlindungan Sipil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
6	350	KEJAHATAN				
	351	Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	352	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	353	Penganiayaan, Pencurian	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	354	Subversi/ Penyelundupan/ Narkoba	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	355	Pemalsuan (Seperti : Uang, Ijazah, Dokumen Negara, Kejahatan Pemalsuan Lainnya)	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	356	Korupsi/ Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan/ KKN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	357	Perkosaan/ Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

✕

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	358	Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	359	Kajahatan dan Pelanggaran Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
7	360	BENCANA				
	361	Gunung berapi / gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	362	Banjir / tanah longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	363	Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	364 . 1	Kebakaran Pemadam Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	365	Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	366	Tsunami	-	-	-	-
	367	Tanggap Darurat	-	-	-	-
	368	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	-	-
8	370	KECELAKAAN/SAR				
	371	D a r a t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	372	Udara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	373	Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	374	Sungai / Danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	375	Gunung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
9	376	KETERTIBAN				
	.1	Kampanye (Meliputi: Himbauan, Pemasangan Spanduk, Keterangan)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.2	Pembinaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.3	Penyelidikan dan Penindakan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.4	Pelanggaran Meliputi: Razia, Sanksi-sanksi, Penyelesaian Perkara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	402	PNPM Mandiri Pedesaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
2	410	PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN				
	411	Pembinaan Usaha Gotong Royong	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Swadaya Gotong Royong				
	.11	Penataan Gotong Royong				
	.12	Gotong Royong Dinamis				
	.13	Gotong Royong Statis				
	.14	Pungutan				
	.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Pembinaan				
	.22	Klasifikasi				
	.23	Proyek				
	.24	Musyawarah				
	.3	Latihan Kerja Masyarakat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Kader Masyarakat				
	.32	Kuliah Kerja Nyata (KKN)				

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.33	Pusat latihan				Bidang Teknis
	.34	Kursus-kursus				
	.35	Kurikulum/silabus				
	.36	Keterampilan				
	.37	Pramuka				
	.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Program				
	.42	Pembinaan Organisasi				
	.43	Kegiatan				
	.5	Penyuluhan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.51	Publikasi				
	.52	Peragaan				
	.53	Sosio Drama				
	.54	Siaran Pedesaan				
	.55	Penyuluhan Lapangan				
	.6	Kelembagaan Desa				
	.61	Kelompok Tani				
	.62	Rukun Tani			Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.64	Dharma Tirta				
	412	Perekonomian Desa				
	.1	Produksi Desa				
	.11	Pengolahan			Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	.12	Pemasaran				
	.2	Keuangan Desa				
	.21	Perkreditan Desa				
	.22	Inventarisasi Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.23	Bantuan/Stimulus				
	.24	Petunjuk/pembinaan pelaksanaan				

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.3	Koperasi Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)				
	.32	Koperasi Usaha Desa				
	.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Jumlah desa yang diberi bantuan				
	.42	Pengarahan				
	.43	Pusat				
	.44	Daerah				
	.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.51	Pusat				
	.52	Daerah				
	.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.61	Bantuan Langsung				
	.62	Bantuan Kekerasian				
	.63	Bantuan Juara Lomba Desa				
	413	Prasarana Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Prasarana Kelurahan				
	.11	Pembinaan				
	.12	Bimbingan teknis				
	.2	Pemukiman Kembali Penduduk	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Lokasi				
	.22	Diskusi				
	.23	Pelaksanaan				
	.3	Masyarakat Pra Kelurahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Pembinaan				
	.32	Penyuluhan				
	.4	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Rumah sehat				
	.42	Proyek perintis				

✕

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.43	Pelaksanaan				
	.44	Pengembangan				
	.45	Perbaikan kampung				
	414	Pengembangan Kelurahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Tingkat Perkembangan Kelurahan				
	.11	Jumlah Kelurahan				
	.12	Pemekaran Kelurahan				
	.13	Pembentukan Kelurahan Baru				
	.14	Evaluasi				
	.15	Bagan				
	.21	Penyuluh Program	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.23	Pelaksanaan				
	.24	Bimbingan / Pembinaan				
	.25	Evaluasi				
	.3	Tata Kelurahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Inventarisasi				
	.32	Penyusunan pola tata Kelurahan				
	.33	Aplikasi tata Kelurahan				
	.34	Pemetaan				
	.35	Pedoman pelaksanaan				
	.36	Evaluasi				
	.4	Perlombaan Kelurahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Pedoman				
	.42	Penilaian				
	.43	Kejuaraan				
	.44	Piagam				
	415	Koordinasi Internal dan Eksternal	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Sektor Khusus				
	.2	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)				

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.3 .41 .42 .43	Tim Koordinasi Pusat (TKP) Luar Negeri (UNICEF) Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Non Kementerian				
3	420	PENDIDIKAN				
	.1	Pendidikan khusus klasifikasi disini pendidikan putra/putri Ijja				
	421	Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .71 .72 .73 .8 .9	Pra Sekolah Sekolah Dasar Sekolah Menengah Sekolah Tinggi Sekolah Kejuruan Kegiatan Sekolah Kegiatan Pelajar Reuni Darmawisata Pelajar teladan Resimen Mahasiswa Sekolah Pendidikan Luar Biasa Pendidikan Luar Sekolah /Pemberantasan Buta Huruf				
	422	Administrasi Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1 .2 .3 .4 .5	Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran Mapras, Perpeloncoan Tahun Pelajaran Hari Libur Uang Sekolah, Klasifikasikan disini SPP Beasiswa				

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
423	Metode Belajar		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.1	Kuliah					
.2	Ceramah, simposium					
.3	Diskusi					
.4	Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Studi					
.5	Tur Kurikulum					
.6	Karya Tulis					
.7	Ujian					
424	Tenaga Pengajar (Seperti : Guru, Dosen, Instruktur, dll)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
425	Sarana Pendidikan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.1	Gedung					
.11	Gedung sekolah					
.12	Kampus					
.13	Pusat kegiatan mahasiswa					
.2	Buku					
.3	Perlengkapan Sekolah					
426	Keolahragaan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.1	Cabang Olah Raga					
.2	Sarana					
.21	Gedung olah raga					
.22	Stadion					
.23	Lapangan					
.24	Kolam renang					
.3	Pesta Olah Raga : PON, Porsade, Olimpiade, dsb					
.4	KONI					
427	Kepemudaan/ Kegiatan Remaja (Seperti: Karang Taruna, Pertukaran Pemuda, Remaja Masjid, dll.)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

8

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	428	Kepramukaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	429	Pendidikan Kedinasaan Untuk Depdagri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
4	430	KEBUDAYAAN				
	431	Kesenian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Cabang Kesenian				
	.2	Sarana				
	.21	Gedung Kesenian				
	432	Kepurbakalaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Museum				
	.2	Peninggalan Kuno				
	.21	Candi termasuk Pemugaran				
	.22	Benda				
	433	Sejarah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	434	Bahasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	435	Usaha Pertunjukan, Hiburan Kesenangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	436	Kepercayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	437	Legenda	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	438	Adat Istiadat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
5	440	KESEHATAN				
	441	Pembinaan Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Gizi				
	.2	Mata				
	.3	Jiwa				
	.4	Kanker				
	.5	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)				
	.6	Perawatan				
	.7	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM.				
	.8	Pekan Imunisasi Nasional (PIN)				
	442	Obat-Obatan	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pengadaan				
	.2	Penyimpanan				
	443	Penyakit Menular	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pencegahan				
	.2	Pemberantasan, Pencegahan Penyakit Menular Langsung				
	.21	Kusta				
	.22	Kelamin				
	.23	Frambusia				
	.24	TBC/AIDS/HIV				
	.3	Epidemiologi dan Karantina (Epidka)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Kolera				
	.32	Imunisasi				
	.33	Survey Lense				
	.34	Rabies/ Anjing gila				

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Malaria				
	.42	Demam Berdarah HDF				
	.43	Filaria				
	.44	Serangga				
	.5	Higiene/Sanitasi Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.51	Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TPPMM)				
	.52	Sarana air minum dan jamban keluarga (Sanijaga)				
	.53	Pestisida				
444	Gizi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan,				
	.2	Busung Lapar Keracunan Makanan				
	.3	Menu Makanan Rakyat				
	.4	Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)				
	.5	Program Makan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas				
445	Puskesmas Keliling, Ploklinik		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
446	Tenaga Medis		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
448	Pengobatan Tradisional		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pijat				
	.2	Tusuk Jarum				
	.3	Jamu Tradisional				
	.4	Dukun/Paranormal				

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	450	AGAMA				
	451	Islam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Peribadatan				
	.11	Sholat				
	.12	Zakat Fitrh				
	.13	Puasa				
	.14	MTQ				
	.2	Rumah Ibadah				
	.3	Tokoh Agama				
	.4	Pendidikan				
	.41	Tinggi				
	.42	Menengah				
	.43	Dasar				
	.44	Pondok Pesantren				
	.45	Gedung Sekolah				
	.46	Tenaga Pengajar				
	.47	Buku				
	.48	Dakwah				
	.49	Organisasi/Lembaga Pendidikan				
	452	Protestan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Peribadatan				
	.2	Rumah Ibadah				
	.3	Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine				
	.4	Mazhab				
	.5	Organisasi gerejani				
	453	Katolik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Peribadatan				
	.2	Rumah ibadah				
	.3	Tokoh agama, rohaniawan, Pendeta, Pastor				



NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.4 .5	Mazhab Organisasi gerejani				
	454 .1 .2 .3 .4 .5	Hindu Peribadatan Rumah Ibadah Tokoh agama, Rohaniawan Mazhab Organisasi keagamaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	455 .1 .2 .3 .4 .5	Budha Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan Mazhab Organisasi keagamaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	456 .1 .2	Urusan Haji ONH Manasik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	457	Agama Lainnya (Meliputi: Peribadatan, Rumah Ibadah, Tokoh Agama, Organisasi Keagamaan)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
7	460	SOSIAL				
	461 .1 .2 .3 .4	Rehabilitasi Penderita Cacat Cacat Mata Cacat tubuh Cacat mental Bisu / tuli	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	462 .1 .2	Tuna Susila Gelandangan Pengemis	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis

f

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.3	Tuna susila				
	.4	Anak Nakal				
	463	Kesejahteraan Anak/ Keluarga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Anak Putus Sekolah				
	.2	Ibu teladan				
	.3	Anak asuh				
	464	Pembinaan Pahlawan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pahlawan Meliputi : Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan kepada pahlawan dan jandanya				
	.2	Perintis kemerdekaan Meliputi : Penghargaan Tunjangan kepada Perintis				
	.3	Cacat Veteran				
	465	Kesejahteraan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Lanjut Usia				
	.2	Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi				
	466	Sumbangan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Korban Bencana				
	.2	Pencarian Dana untuk Sumbangan				
	.3	Meliputi: Penyelenggaraan undian, Ketangkasan,				
	.4	Panti Asuhan				
	.5	Panti Jompo				
	467	Bimbingan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Masyarakat suku terasing meliputi: Bimbingan, Pendidikan Kesehatan, Pemukiman				
	468	Palang Merah Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	469	Makam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Umum				
	.2	Pahlawan meliputi : penghargaan kepada				

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.3	Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya				
	.4	Krematorium				
8	470	KEPENDUDUKAN				
	471	Pendaftaran Penduduk				
	.1	Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.11	Biodata				
	.12	Nomor Induk Kependudukan				
	.13	Kartu Tanda Penduduk				
	.14	Kartu Keluarga				
	.15	Advokasi Identitas Penduduk				
	.2	Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Perpindahan penduduk WNI				
	.22	Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia				
	.23	Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara				
	.24	Daerah Terbelakang				
	.25	Bedol Kelurahan				
	.3	Perpindahan Penduduk Antar Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Penduduk Indonesia ke luar negeri				
	.32	Orang asing tinggal sementara				
	.33	Orang asing tinggal tetap				
		Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan				
	.34	Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)				
	.4	Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Akibat Bencana Alam				
	.42	Akibat Kerusuhan Sosial				
	.43	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang				
	.44	Pendaftaran penduduk rentan				

f

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	472	Pencatatan Sipil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Kelahiran, Kematian, dan Advokasi Kelahiran				
	.11	Kematian				
	.12	Advokasi kelahiran dan kematian				
	.13					
	.2	Perkawinan, Perceraian, dan Advokasi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Perkawinan agama Islam				
	.22	Perkawinan agama non Islam				
	.23	Perceraian agama Islam				
	.24	Perceraian agama non Islam				
	.25	Advokasi perkawinan dan perceraian				
	.3	Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Pengangkatan anak				
	.32	Pengakuan anak				
	.33	Pengesahan anak				
	.34	Perubahan anak				
	.35	Pembatalan anak				
	.36	Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta				
	.4	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Akibat perkawinan				
	.42	Akibat kelahiran				
	.43	Non perkawinan				
	.44	Non kelahiran				
	.45	Perubahan WNI ke WNA				
	473	Informasi Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Teknologi Informasi				

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.11	Perangkat keras				Bidang Teknis
	.12	Perangkat lunak				
	.13	Jaringan komunikasi data				
	.2	Kelengkapan dan Sumber Daya Informasi				
	.21	Daerah Maju	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	
	.22	Daerah Berkembang				Bidang Teknis
	.23	Daerah Terbelakang				
	.3	Pengolahan Data Kependudukan				
	.31	Pendaftaran penduduk				
	.32	Kejadian vital penduduk				Bidang Teknis
	.33	Penduduk non registrasi				
	.4	Pelayanan Informasi Kependudukan				
	.41	Media elektronik				
	.42	Media cetak				Bidang Teknis
	.43	Outlet				
	474	Perkembangan Penduduk				
	.1	Pengarahan Kuantitas Penduduk				
	.11	Struktur jumlah			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.12	Komposisi				
	.13	Fertilitas				
	.14	Kesehatan reproduksi				
	.15	Morbiditas penduduk				
	.16	Mortalitas penduduk				
	.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk				
	.21	Anak dan remaja				
	.22	Penduduk usia produktif	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.23	Penduduk lanjut usia				
	.24	Gender				

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
.3 .31 .32 .33 .34 .35	Penataan Persebaran Penduduk Migrasi antar wilayah Migrasi Internasional Urbanisasi Sementara Migrasi non permanen		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.4 .41 .42 .43 .44	Perlindungan Pemberdayaan Penduduk Pengembangan sistem perlindungan Pelayanan kelembagaan ekonomi Pelayanan kelambagaan sosial budaya Partisipasi masyarakat		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.5 .51 .52 .53 .54	Pengembangan Wawasan Kependudukan Pendidikan jalur sekolah Pendidikan jalur luar sekolah Pendidikan jalur masyarakat Pembangunan berwawasan kependudukan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
475 .1 .11 .12 .13	Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Indikator Kependudukan Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan Pemanfaatan indikator kependudukan Sosialisasi indikator kependudukan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.2 .21 .22 .3 .31 .32	Proyeksi Kependudukan Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan Pemanfaatan proyeksi kependudukan Analisis Dampak Kependudukan Penyusunan dan Pengembangan Pemanfaatan analisis dampak kependudukan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.4	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Lembaga Internasional				
	.42	Lembaga Masyarakat dan Nirlaba				
	.43	Lembaga Usaha Swasta	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.5	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah				
	.51	Lembaga Pemerintah				
	.52	Pemerintah Provinsi dan Kota				
	.53	Pemerintah Kabupaten				
	.6	Analisis				
	476	Monitoring	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	477	Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	480	HUMAS				
	481	Penerbitan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Surat Kabar				
	.2	Majalah				
	.3	Buku				
	.4	Penerjemahan				
	482	Radio	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	RRI				
	.11	Siaran Pedesaan jangan di klasifkasi di sini				
	.2	Non RRI				
	.3	Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	483	Televisi				

4

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

VI. PERECONOMIAN

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	500	PERECONOMIAN				
	. 1	Dewan Stabilitas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	501	Pengadaan Pangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	502	Pengadaan Sandang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
	503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi masalahnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	504	Koordinasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	505	Produksi Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	. 1	Monitoring Potensi Daerah				

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	506	BUMD			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	
	.1	Pembinaan				
2	510	PERDAGANGAN / TATANIAGA				
	.1	Promosi Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.11	Pekan Raya				
	.12	Iklan				
	.13	Pameran non komersil				
	.2	Pelelangan				
	.3	Tera				
	511	Pemasaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Sembilan Bahan Pokok, tambahkan kode wilayah : Beras, Garam, Tanah, Minyak Goreng				
	.2	Pasar				
	.3	Pertokoan, Kaki Lima, Kios				
	512	Ekspor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	513	Impor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	514	Perdagangan Antar Pulau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	515	Perdagangan Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	516	Pergudangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	517	Aneka Usaha Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	518	Koperasi untuk BUUD, KUD Lihai (412.31 - 412.32)	Biasa/ Terbuka			
3	520	PERTANIAN				
	521	Tanaman Pangan Program	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Program				
	.11	Bimas/Inmas Termasuk Kredit				
	.12	Penyuluhan				
	.2	Produksi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Padi/Panen				
	.22	Palawija				
	.23	Jagung				
	.24	Ketela Pohon/Ubi-ubian				
	.25	Hortikultura				
	.26	Sayuran/Buah-buahan				
	.27	Tanaman Hias				
	.28	Pembudidayaan Rumput Laut				
	.3	Sarana Usaha Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Peralatan meliputi : Traktor dan peralatan dll				
	.31	Pembibitan				
	.33	Pupuk				
	.34	Air irigasi				
	.4	Perlindungan Tanaman	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang				
	.42	Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungru, Tikus dan Sejenisnya				

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.43	Pemberantasan hama meliputi: penyemprotan, penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pemberantasan melalui Udara				
	.44	Pestisida				
	.5	Tanah Pertanian Pangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.51	Persawahan				
	.52	Perladangan				
	.53	Kebun				
	.54	Rumpun Ikan Laut				
	.55	KTA/ Lahan Kritis				
	.6	Pengusaha Petani	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.7	Bina Usaha				
	.71	Pasca Panen				
	.72	Pemasaran hasil				
	522	Kehutanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Program				
	.11	Hak Pengusahaan Hukum				
	.12	Tata guna hutan				
	.13	Perpetaan hutan				
	.14	Tumpang sari				
	.2	Produksi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Kayu				
	.22	Non kayu				
	.3	Sarana Usaha Kehutanan				
	.4	Penghijauan, Reboisasi				
	.5	Kelestarian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.51	Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa				
	.52	Berburu meliputi: Larangan dan izin berburu				
	.53	Kebun Binatang				

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.54	Konservasi Lahan				
	.6	Penyakit/Hama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.7	Jenis -Jenis Hutan				
	.71	Hutan Hidup				
	.72	Hutan Wisata				
	.73	Hutan Produksi				
	.74	Hutan Lindung				
523	Perikanan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Program					
.11	Penyuluhan					
.12	Teknologi					
.2	Produksi					
.21	Pelelangan					
.3	Usaha Perikanan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
.31	Pembibitan					
.32	Daerah Penangkapan					
.33	Pertambakan, meliputi : tambak ikan air deras, tambak udang dan lain-lain					
.34	Jaring terapung					
.4	Sarana		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
.41	Peralatan					
.42	Kapal					
.43	Pelabuhan					
.5	Pengusaha					
.6	Nelayan					
524	Peternakan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Produksi					
.11	Susu Ternak Rakyat					
.12	Telur					
.13	Daging					

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.14	Kulit				
	.2	Sarana Usaha Ternak	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.21	Pembibitan				
	.22	Kandang Ternak				
	.3	Kesehatan Hewan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.31	Penyakit hewan				
	.32	Pos Kesehatan Hewan				
	.33	Tesi pullorum				
	.34	Karantina				
	.35	Pemberantasan penyakit hewan termasuk usaha pencegahannya				
	.4	Perunggasan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.5	Pengembangan Ternak				
	.51	Inseminasi Buatan				
	.52	Pembibitan/Bibit Unggul				
	.53	Penyebaran Ternak				
	.6	Makanan Ternak				
	.7	Tempat Pemotongan Hewan				
	.8	Data Peternakan				
525	Perkebunan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Program					
.2	Produksi					
.21	Karet					
.22	Teh					
.23	Tembakau					
.24	Tebu					
.25	Cengkeh					
.26	Kopra					
.27	Kopi					

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.28	Coklat				
	.29	Aneka Tanaman				
	526	Jambu Mente	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	527	Tanaman Tahunan				
	528	Tanaman Semusim				
4	530	PERINDUSTRIAN				
	.08	Undang-undang Gangguan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	531	Industri Logam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	532	Industri Mesin/Elektronik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	533	Industri Kimia/Farmasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	534	Industri Tekstil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	535	Industri Makanan/Minuman	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	536	Aneka Industri/Perusahaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	537	Aneka Kerajinan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis

f

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	538	Usaha Negara/BUMN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Perusahaan Jawatan (Perjan)				
	.2	Perusahaan Umum (Perum)				
	.3	Persero/ PT.CV				
	539	Perusahaan Daerah/BUMD/BLUD	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
5	540	PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN				
	541	Minyak Bumi/ Bensin	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Pengusahaan				
	542	Gas Bumi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Eksplorasi/Pengeboran				
	.11	Kontrak Kerja				
	.2	Pengolahan meliputi: Tangki, Pompa, Tanker				
	543	Aneka Tambang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Timah				
	.2	Aluminium Boxit				
	.3	Besi termasuk Besi Tua				
	.4	Tembaga				
	.5	Batu Bara				
	544	Logam Mulia, Emas, Intan, Perak	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	545	Logam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	546	Geologi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Vulkanologi				
	.11	Pengawasan Gunung Berapi				
	.2	Sumur Artesis, Air Bawah Tanah				

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	547	Hidrologi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	548	Kesamuderaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	549	Pesisir Pantai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
6	550	PERHUBUNGAN				
	551	Perhubungan Darat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau				
	.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu				
	.2	Angkutan Jalan Raya				
	.21	Perizinan				
	.22	Terminal				
	.23	Alat Angkutam				
	.3	Angkutan Sungai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.31	Perizinan				
	.32	Terminal				
	.33	Pelabuhan				
	.4	Angkutan Danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.41	Perizinan				
	.42	Terminal				
	.43	Pelabuhan				
	.5	Feri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.51	Perizinan				
	.52	Terminal				
	.53	Pelabuhan				
	.6	Perkereta Apiian				

✕

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
552	Perhubungan Laut		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1 Lalu lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum					
	.11 Keamanan lalu lintas, rambu-rambu					
	.12 Pelayanan Dalam Negeri					
	.13 Pelayaran luar Negeri					
553	.2 Perkapalan Alat Angkutan					
	.3 Pelabuhan					
	.4 Pengerukan					
	.5 Penjagaan Pantai					
	Perhubungan Udara		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
554	.1 Lalu lintas Udara/ Keamanan lalu lintas udara					
	.2 Pelabuhan Udara					
	.3 Alat angkutan					
	POS		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	Meliputi Pos biasa, Pos Wesel, Kilat biasa, Kilat Khusus, dll					
555	Telekomunikasi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1 Telepon					
	.2 Telegram					
	.3 Telex/SSB, Faximile					
	.4 Satelit, Internet					
556	.5 Stasiun Bumi, Parabola					
	Pariwisata dan Rekreasi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1 Obyek Kepariwisataaan TMII					
	.2 Perhotelan					
	.3 Travel Service					
557	.4 Tempat Rekreasi					
	Meteorologi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1 Ramalan Cuaca					
	.2 Curah Hujan					
	.3 Kemarau Panjang					

✕

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7	560	TENAGA KERJA				
	.1	Pengangguran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	561	Upah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	562	Penempatan Tenaga Kerja, TKI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	563	Latihan Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	564	Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Butsi				
	.2	Padat Karya				
	565	Perselisihan Perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	566	Keselamatan Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	567	Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	568	Kesejahteraan Buruh	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	569	Tenaga Orang Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
8	570	PERMODALAN				
	571	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	572	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	573	Modal Patungan (Join Venture/ Penyertaan Modal)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	574	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	575	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	576	Belanja Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	577	Modal daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
9	580	PEBANKAN DAN MONETER				
	581	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	582	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	583	Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	584	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	585	Perasuransian / Asuransi Dana Kecelakaan Lalu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	586	Alat Pembayaran, Cek Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	587	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	588	Hutang Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	589	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
10	590	AGRARIA				
	591	Tata Guna Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Pemetaan dan Pengukuran				
	.2	Perpetaan				
	.3	Penyediaan Data				
	.4	Fatwa Tata Guna Tanah				
	.5	Tanah Kritis				
	592	Landreform	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Redistribusi				
	.11	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan				
	.12	Penentuan Tanah Obyek Landreform				
	.13	Pembagian Tanah Obyek Landreform				
	.14	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform				
	.2	Ganti rugi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.21	Ganti Rugi Tanah kelebihan				
		Meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah, Kelebihan Tanah				
	.22	Ganti Rugi Tanah Absentee				
		Meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee				
	.23	Ganti Rugi Tanah Partikelir				
	.3	Bagi hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.31	Penetapan Imbangan Bagi Hasil				
	.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil				
	.33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil				
	.4	Gadai tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.41	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan				
	.42	Pelaksanaan Gadai Tanah				
	.43	Sengketa Gadai Tanah				

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.5 .6 .7	Bimbingan dan Penyuluhan Pengembangan Yayasan Dana Landreform				
	593 .01 .1 .11	Pengurusan Hak-hak Tanah Penyusunan Program dan Bimbingan teknis Sewa Tanah Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu: Tebu, Tembakau, Rosela, Chorcorus	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.2 .21 .22 .3 .31 .311 .312 .32 .321 .322	Hak Milik Perorangan Badan Hukum Hak Pakai Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) Warga Negara Asing (WNA) Badan Hukum Badan Hukum Indonesia Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.33	Tanah Gedung-gedung Negara				
	.4 .41 .42 .43 .44 .45	Guna Usaha Perkebunan Besar Perkebunan Rakyat Pernakan Perikanan Kehutanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.5 .51 .52 .53 .54 .55	Hak Guna Bagunan Perorangan Badan Hukum P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda) Badan hukum asing Belanda -Prk No. 5156 Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

✱

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.6 .61 .62 .7 .71 .8 .81 .82 .83	Hak Pengelolaan PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan Sengketa Tanah Peradilan Perkara Tanah Pencabutan dan Pembebasan Tanah Pencabutan hak Pembebasan Tanah Ganti Rugi Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	594 .1 .11 .12 .13 .14 .2 .3 .4	Pendaftaran Tanah Pengukuran / Pemetaan Fotogrametri Teristis Triangulasi Peralatan Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/1965) Sertifikat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	595 .1 .2 .3 .4	Lahan Transmigrasi Tata Guna Tanah Landreform Pengurusan Hak-hak Tanah Pendaftaran Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 36 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAAN

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	600	PEKERJAAN UMUM				
	601	Tata Bangunan Konstruksi dan Industri Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang teknis
	602	Kontraktor Pemborong	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Tender				
	.2	Penunjukan				
	.3	Prakualifikasi				
	.31	Daftar Rekanan Mampu (DRM)				
	.32	Tanda Daftar Rekanan				
	603	Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Tanah dan Batu				
	.2	seperti : Batu belah, Steen slaag, Splilt dsb				
	.3	Aspal, Aspal buatan, Aspal alam (Butas)				
	.31	Besi dan logam lainnya				
	.31	Besi beton				
	.32	Besi Profil				

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.33	Paku				
	.34	Aluminium, profil				
	.4	Bahan-bahan pelindung dan pengawet (Cat, Tech Til)Pengawet kayu				
	.5	Semen				
	.6	Kayu				
	.7	Bahan penutup atap (Genting, asbes gelombang, seng dan sebagainya)				
	.8	Alat pengantung dan pengunci				
	.9	Bahan-bahan bangunan lainnya				
605	605	Instalasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Instalasi Bangunan				
	.2	Instalasi Listrik				
	.3	Instalasi Air Sanitasi				
	.4	Instalasi Pengatur Udara				
	.5	Instalasi Akustik				
	.6	Instalasi Cahaya/Penerangan, dll				
606	606	Konstruksi Pencegahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran				
	.2	Konstruksi pencegahan terhadap gempa				
	.3	Konstruksi pencegahan terhadap angin udara/ panas				
	.4	Konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan				
	.5	Konstruksi pencegahan terhadap gas/explosive				
	.6	Konstruksi pencegahan terhadap serangan				

✶

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.7	Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom				
	607	-	-	-	-	-
	608	-	-	-	-	-
	609	-	-	-	-	-
2	610	PENGALIRAN				
	611	Irigasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Bangunan Waduk				
	.11	Bendungan				
	.12	Tanggul				
	.13	Pelimpahan Banjir				
	.14	Menara Pengambilan				
	.2	Bangunan pengambilan				
	.21	Bendungan				
	.22	Bendungan dengan pintu bilas				
	.23	Bendungan dengan pompa				
	.24	Pengambilan bebas				
	.25	Pengambilan bebas dengan pompa				
	.26	Sumur dengan pompa				
	.27	Kantung lumpur				
	.28	Slit Ekstrator				
	.29	Escope Channel				
	.3	Bangunan Pembawa				
	.31	Saluran				
	.311	Saluran Induk				
	.312	Saluran sekunder				
	.313	Suplesi				

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.314	Tersier				
	.315	Saluran Kwartier				
	.316	Saluran Pasangan				
	.317	Saluran Tertutup/ Terowongan				
	.32	Bangunan				
	.321	Bagunan Bagi				
	.322	Bangunan Bagi dan Sedap				
	.323	Bangunan Sadap				
	.324	Bangunan Check				
	.325	Bangunan Terjun				
	.33	Box tersier				
	.34	Got Miring				
	.35	Talang				
	.36	Syphon				
	.37	Gorong - gorong				
	.38	Pelimpah samping Bangunan Pembuang				
	.4	Bangunan Pembuang				
	.41	Saluran				
	.411	Saluran Pembuang Induk				
	.412	Saluran Pembuang Skunder				
	.413	Saluran Tersier				
	.42	Bangunan				
	.421	Bangunan Outlet				
	.422	Banguan Terjun				
	.423	Bangunan Penahan Banjir				
	.43	Gorong-Gorong Pembuang				
	.44	Talang Pembuang				

tt

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.45 .5 .51 .511 .512 .52 .521 .522 .53 .54 .55 .56 .57 .58	Sypon Pembuang Bangunan Lainnya Jalan Jalan Inspeksi Jalan Logistik Waduk Lapangan Jembatan Jembatan Inspeksi Jembatan Hewan Tangga Cuci Kubangan Kerbau Waduk Lapangan Bangunan Penunjang Jaringan Telepon Stasiun Agro				
	612 .1 .11 .12 .13 .2 .21 .211 .212 .213 .22 .23 .24 .25 .3	Folder Tanggul Keliling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan Pembawa saluran Saluran muka Saluran pembawa waduk Saluran pembawa sekunder Stasiun Pompa Pemasukan Bagunan bagi Gorong- gorong Syphon Bangunan pembuang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.31 .32 .321 .322 .33 .34 .35 .4 .41 .411 .412 .413 .414 .42	Stasiun pompa pembuang Saluran Saluran pembuang induk Saluran pembuang sekunder Pintu air pembuangan Gorong-gorong pembuangan Syphon pembungan Bangunan Lainnya Bangunan Bangunan pengukur air Bangunan pengukur curah hujan Bangunan gudang stasiun pompa Bangunan listrik stasiun pompa Rumah petugas Aksploitasi				
	613 .1 .11 .111 .112 .113 .114 .12 .2 .21 .211 .212	Pasang Surut Bangunan Pembawa Saluran Saluran pembawa induk Saluran pembawa sekunder Saluran penawar tersier Saluran penyimpanan air Bangunan pintu pemasukan Bangunan pembuang Saluran Saluran pembuang induk Saluran pembuang sekunder	Biasa/ Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.213	Saluran pembuang tersier				
	.214	Saluran pengumpul air				
	.22	Bangunan pintu pembuang				
	.3	Bangunan lainnya				
	.31	Kolam pasang				
	.32	Saluran				
	.321	Saluran lalu lintas				
	.322	Saluran muka				
	.33	Bangunan				
	.331	Bangunan penangkis kotoran				
	.332	Bangunan pengukur muka air				
	.333	Bangunan pengukur curah hujan				
	.34	Jalan				
	.35	Jembatan				
	614	Pengendalian Sungai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Bangunan Pengamanan				
	.11	Tanggul banjir				
	.12	Pintu Pengatur banjir				
	.13	Klep pengatur banjir				
	.14	Tembok pengamanan Talud				
	.15	Krib				
	.16	Kantung lumpur				
	.17	Check-Dam				
	.18	Syphon				
	.2	Saluran pengamanan				
	.21	Saluran banjir				
	.22	Saluran Drainase				

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.23 .3 .31 .32 .321 .322 .323 .324 615 .1 .2 .3	Corepure Bangunan Lainnya Warning System Stasiun Stasiun pengukur curah hujan Stasiun pengukur air Stasiun pengukur cuaca Stasiun pos penjagaan Pengamanan Pantai Tanggul Krib Bangunan lainnya				
	616 .1 .2 .3 .4	Air Tanah Stasiun Pompa Bangunan pembawa Bangunan Pembuang Bangunan lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	617	-	-	-	-	-
	618	-	-	-	-	-
	619	-	-	-	-	-
3	620	JALAN				
	621 .1 .11 .12 .13 .2 .21	Jalan kota Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

✕

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.22	Jembatan sementara				
	.23	Kantor proyek				
	.24	Gudang proyek				
	.25	Barak kerja				
	.26	Laboratorium lapangan				
	.27	Rumah				
	.3	Badan jalan				
	.31	Pekerjaan tanah (Earth Work)				
	.32	Stabilitas				
	.4	Perkerasan				
	.41	Lapis pondasi bawah				
	.42	Lapis pondasi				
	.43	Lapis permukaan				
	.5	Drainage (Culvert)				
	.51	Parit tanah				
	.52	Gorong-gorong				
	.6	Buku Trotuir				
	.61	Tanah				
	.62	Perkerasan				
	.63	Pasangan				
	.7	Median				
	.71	Tanah				
	.72	Tanaman				
	.73	Perkerasan				
	.74	Pasangan				
	.8	Daerah samping				
	.82	Tanaman				
	.83	Pagar				

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.9	Bangunan pelengkap dan pengamanan				
	.91	Rambu-rambu / tanda lalu lintas				
	.92	Lampu penerangan				
	.93	Lampu pengatur lalu lintas				
	.94	Patok-patok KM				
	.95	Patok-patok ROW (Sempadan)				
	.96	Rel pengamanan				
	.97	Pagar				
	.98	Turap Penahan				
	.99	Bronjong				
	622	Jalan Luar Kota	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Daerah penguasaan				
	.11	Tanah				
	.12	Tanaman				
	.13	Bangunan				
	.2	Bangunan Sementara				
	.21	Jalan sementara				
	.22	Jembatan sementara				
	.23	Kantor proyek				
	.24	Gedung proyek				
	.25	Barak kerja				
	.26	Laboratorium lapangan				
	.27	Rumah				
	.3	Badan jalan				
	.31	Pekerjaan tanah (Earth Work)				
	.32	Stabilisasi				
	.4	Perkerasan				
	.41	Lapis pondasi bawah				

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.42	Lapis pondasi				
	.43	Lapis permukaan				
	.5	Drainase				
	.51	Parit				
	.52	Gorong-gorong (culvert)				
	.53	Sub Drainase				
	.6	Trotoar				
	.61	Tanah				
	.62	Perkerasan				
	.7	Median				
	.71	Tanah				
	.72	Tanaman				
	.73	Perkerasan				
	.74	Pasangan				
	.8	Daerah samping				
	.81	Tanaman				
	.82	Pagar				
	.9	Bangunan perlengkap dam pengaman				
	.91	Rambu-rambu / Tanda lalu lintas				
	.92	Lampu penerangan				
	.93	Lampu pengatur lalu lintas				
	.94	Patok-patok KM				
	.95	Patok-patok ROW (Sempadan)				
	.96	Rel pengamanan				
	.97	Pagar				
	.98	Turap Penahan				
	.99	Bronjong				

✶

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	623	-	-	-	-	-
4	630	JEMBATAN				
	631	Jembatan pada Jalan Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Daerah penguasaan				
	.11	Tanah				
	.12	Tanaman				
	.13	Bangunan				
	.2	Bangunan sementara				
	.21	Jalan sementara				
	.22	Jembatan sementara				
	.23	Kantor proyek				
	.24	Gudang proyek				
	.25	Barak kerja				
	.26	Laboratorium lapangan				
	.27	Rumah				
	.3	Pekerjaan tanah (Earth Work)				
	.31	Galian tanah				
	.32	Timbunan tanah				
	.4	Pondasi				
	.41	Pondasi kepala jalan				
	.42	Pondasi pilar				
	.43	Angker				
	.5	Bangunan bawah				
	.51	Kepala jembatan				
	.52	Pilar				
	.53	Piloon				
	.54	Landasan				
	.6	Bangunan				

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.61	Gelagar				
	.62	Lantai				
	.63	Perkerasan				
	.64	Jalan orang/Trotoar				
	.65	Sandaran				
	.66	Talang air				
	.7	Bangunan/ pengaman				
	.71	Turap penahan				
	.72	Bronjong				
	.73					
	.74	Kist dam				
	.75	Corepure				
	.76	Krib				
	.8	Bangunan pelengkap				
	.81	Rambu-rambu / Tanda-tanda lalu lintas				
	.82	Lampu penerangan				
	.83	Lampu pengatur lalu lintas				
	.84	Patok Pengamanan				
	.85	Patok ROW (Sempedan)				
	.86	Pagar				
	.9	Oprit				
	.91	Badan				
	.92	Perkerasan				
	.93	Drainase				
	.94	Baku				
	.95	Median				
	632	Jembatan pada Jalan Luar Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis
	.1	Daerah penguasaan				

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.11 .12 .13 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .3 .31 .32 .4 .41 .42 .43 .5 .51 .52 .53 .54 .6 .61 .62 .63 .64	Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Bangunan Sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor proyek Gudang proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (Earth Work) Galian tanah Timbunan tanah Pondasi Pondasi Kepala Jembatan Pondasi pilar Pondasi Angker Bangunan bawah Kepala jembatan Pilar Piloon Landasan Bangunan atas Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/Trotoar			dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.65 .66 .7 .71 .72 .73 .74 .75 .76 .8 .81 .82 .83 .84 .85 .86 .9 .91 .92 .93 .94 .95	Sandaran Talang air Bangunan pengamanan Turap/penahan Bronjong Strek dam Kist dam Corepure Krib Bangunan pelengkap Rambu-rambu / Tanda lalu lintas Lampu penerangan Lampu pengatur lalu lintas Patok pengamanan Patok ROW (Sempekan) Agar Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median				
	633	-	-	-	-	-
	634	-	-	-	-	-
	635	-	-	-	-	-
5	640	BANGUNAN				
	.1 .2	Gedung pengedilan Rumah pejabat Negara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.3	Gedung DPR			dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	.4	Gedung Balaiikota Penjara Perkantoran Penjara				
	.5	Perkantoran				
	.6					
	642	Bangunan Pendidikan Taman Kanak-kanak SD & Sekolah Menengah Perguruan Tinggi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1					
	.2					
	.3					
	643	Bangunan Rekreasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Bangunan Olah Raga				
	.2	Gedung Kesenian				
	.3	Gedung Pemancar				
	644	Bangunan Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Pusat Perbelanjaan				
	.2	Gedung Perdagangan Bank				
	.3	Perkantoran				
	.4					
	645	Bangunan Pelayanan Umum Kakus (MCK)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Gedung Parkir				
	.2	Rumah Sakit				
	.3	Gedung Telekomunikasi				
	.4	Terminal Angkutan Laut				
	.5	Terminal Angkutan Udara				
	.6	Terminal Angkutan darat				
	.7					
	.8	Bangunan Keagamaan				

ff

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
646	646	Bangunan Peninggalan Sejarah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Monumen				
	.2	Candi				
	.3	Keraton				
	.4	Rumah Tradisional				
647	647	Bangunan Industri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
648	648	Bangunan Tempat Tinggal	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	648.1	Rumah Perkotaan				
	648.11	Inti/Sederhana				
	648.12	Sedang/Mewah				
	648.2	Rumah Pedesaan				
	648.21	Rumah Contoh				
	648.3	Real Estate				
	648.4	Bapetarum				
	649	Elemen Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Pondasi				
	.11	Di atas tiang				
	.2	Dinding				
	.21	Penahan beban				
	.22	Tidak menahan beban				
	.3	Atap				
	.4	Lantai/Langit-langit				
	.41	Supended				
	.42	Solit				
	.5	Pintu/Jendela				

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.51 .52 .53 .54 .55 .56	1. Pintu Harmonik 2. Pintu biasa 3. Pintu sorong 4. Pintu kayu 5. Jendela sorong 6. Jendela vertical				
6	650	TERUMAHAN DAN PEMUKIMAN WILAYAH				
	651 .1 .2	Daerah Perdagangan / Pelabuhan Daerah pusat perbelanjaan Daerah perkotaan	Biasa / Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	652	Daerah Pemerintahan	Terbatas	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	653 .1 .2	Daerah Perumahan Kepadatan rendah Kepadatan tinggi	Biasa / Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	654 .1 .2 .3	Daerah Industri Industri berat Industri ringan Industri Rumah tangga, dll	Biasa / Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	655	Daerah Rekreasi	Biasa / Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.1 .2 .3	Publik Garden Sport dan Playing Fields Open Space			mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	656 .1 .2 .3	Area Transportasi (Tata letak) Jaringan jalan Penerangan jalan Jaringan kereta api Jaringan sungai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	657 .1 .2 .21 .211 .212 .213 .214 .22 .23	Assainering Saluran pengumpulan Instalasi pengolahan Bangunan Bangunan Penyarangan Bangunan penghancur kotoran/sampah Bangunan Pengendap Bangunan Pegering lumpur Unit Densifektan Unit Perpompaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	658 .1 .11 .12 .2 .3 .31 .4 .5	Kesehatan Lingkungan Persampahan Bangunan pengumpul Bangunan pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air buangan industri limbah Kegaduhan Kebersihan Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	659	-	-	-	-	-
7	660	LINGKUNGAN HIDUP				

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.1	Persampahan	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.2	Kebersihan Lingkungan				
	.3	Pencemaran				
	.31	Pencemaran Air				
	.32	Pencemaran Udara				
661	Daerah Hutan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
662	Daerah Pertanian		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
663	Daerah Pemukiman		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
664	Pusat Pertumbuhan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
665	Transportasi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Jaringan jalan				
	.2	Jaringan kereta api				
	.3	Jaringan sungai				
666		-	-	-	-	-
667		-	-	-	-	-
668		-	-	-	-	-

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
8	670	KETENAGAAAN				
671	Listrik		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis
.1	Kelistrikan					
.11	Kelistrikan PLN					
.12	Kelistrikan non PLN					
.2	Pembangkit Tenaga Listrik					
.21	PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)					
.22	PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)					
.23	PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)					
.24	PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)					
.25	PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)					
.26	PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)					
.3	Transmisi tenaga listrik					
.31	Gardu Induk/Gardu penghubung /Gardu Trafo					
.32	Saluran udara tegangan tinggi					
.33	Kabel Bawah tanah					
.4	Distribusi tenaga listrik					
.41	Gardu distribusi					
.42	Tegangan rendah					
.43	Tegangan menengah					
.44	Jaringan bawah tanah					
.5	Pengusahaan listrik					
.51	Sambungan listrik					
.52	Penjualan tenaga listrik					

8

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7		
	.53	Tarif listrik						
	672	Tenaga Air	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis		
	673	Tenaga Minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis		
	674	Tenaga Gas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis		
	675	Tenaga Matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis		
	676	Tenaga Nuklir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis		
	677	Tenaga Panas Bumi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis		
	678	Tenaga Uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis		

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	679	Tenaga lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
9	680	PERALATAN				
	681	-	-	-	-	-
	682	-	-	-	-	-
	683	-	-	-	-	-
10	690	AIR MINUM				
	691	Intake Broncaptering Sumur Bendungan Saringan (Screen) Pintu air Saluran pembawa Alat ukur Perpompaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	692	Transmisi Air Baku Perpipaan .1 Katup Udara (Air relief) .2 Katup Penguras (blow off) .3 Bak pelepas tekanan .4 Jembatan pipa .5 Syphon .6	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	693	Instalasi Pengelolaan Bangunan Ukur .1 Bangunan Aerasi .2	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.3	Bangunan Pengendapan				
	.4	Bangunan pembubuh bahan kimia				
	.5	Bangunan pengaduk				
	.6	Bangunan saringan				
	.7	Perpompaan				
	.8	<i>Clear Hell</i>				
	694	Distribusi	Biasa/ Terbuka	Escion III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Reservoir Menara Bawah tanah				
	.11	Menara				
	.12	Reservoir di bawah tanah				
	.2	Perpipaan				
	.3	Perpompaan				
	.4	Jembatan Pipa				
	.5	Syphon				
	.6	Hydran				
	.61	Hydran umum				
	.62	Hydran kebakaran				
	.7	Katup				
	.71	Katup udara (Air relief)				
	.72	Katup pelepas (blow off)				
	.8	Bak Pelepas Tekanan				
	695	-	-	-	-	-
	696	-	-	-	-	-
	697	-	-	-	-	-

✶

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	698	-	-	-	-	-
	699	-	-	-	-	-

WALIKOTA BIMA
MUHAMMAD LUTFI

+

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 36 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

VIII. PENGAWASAN

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	700	PENGAWASAN				
	701	Bidang Usaha Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	702	Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	703	Bidang kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	704	Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi /Kearsipan Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	705	Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	706	Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	707	Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	708	Bidang Konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	709	Bidang Perjalanan Dinas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
2	710	BIDANG PEMERINTAHAN				
	711	Bidang Pemerintahan Pusat	-	-	-	-
	712	Bidang Pemerintahan Provinsi	-	-	-	-
	713	Bidang Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	714	Bidang Pemerintahan Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	715	Bidang MPR/ DPR	-	-	-	-
	716	Bidang DPRD Propinsi	-	-	-	-
	717	Bidang DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	718	Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	719	Bidang Hubungan Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	
3	720	BIDANG POLITIK				
	721	Bidang Kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	724	Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	725	Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	726	Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	727	Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
4	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN				
	731	Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

+

NO	KLASIFIKASI	J E N I S	A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
	732	Bidang Kemiliteran		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	733	Bidang Perlindungan Masyarakat		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	734	Bidang Keamanan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	735	Bidang Kejahatan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	736	Bidang Bencana		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	737	Bidang Kecelakaan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	738		-	-	-	-	-
	739		-	-	-	-	-
5	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	741	Bidang Pembangunan Desa		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	742	Bidang Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	743	Bidang Kebudayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	744	Bidang Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	745	Bidang Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	746	Bidang Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	747	Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	748	Bidang Media Massa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	749	-	-	-	-	-
6	750	BIDANG PEREKONOMIAN				
	751	Bidang Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	752	Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	753	Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	tugas Perangkat Daerah/ unit kerja Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	754	Bidang Pertambangan/ Kesamudraan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	755	Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	756	Bidang Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	757	Bidang Permodalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	758	Bidang Perbankan / Moneter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	759	Bidang Agraria	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
7	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM				

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S	A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	761	Bidang Pengairan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
	762	Bidang Jalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
	763	Bidang Jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
	764	Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
	765	Bidang Tata Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
	766	Bidang Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
	767	Bidang Ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
	768	Bidang Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
	769	Bidang Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	770	-	-	-	-	-
	771	-	-	-	-	-
	772	-	-	-	-	-
8	780	BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	Bidang Pengadaan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	782	Bidang Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	783	Bidang Kedudukan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	784	Bidang Kesejahteraan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	785	Bidang Cuti	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	786	Bidang Penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	788	Bidang Pemberhentian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	789	Bidang Pendidikan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	790	BIDANG KEUANGAN				
	791	Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	792	Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	793	Bidang Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	794	Bidang Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	795	Bidang Perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	796	Bidang Pembinaan Kebendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	797	Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	798					
	799	Bidang Bendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA
MUHAMMAD LUTFI

+

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

IX. KEPEGAWAIAN

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	800	KEPEGAWAIAN				
	.1 .2 .043 .05 .07 .08	Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian Perencanaan Penelitian Pengaduan Tim Statistik Peraturan perundang- undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
2	810	PENGADAAN				
		Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai				
	811 .1 .2 .3	Lamaran Testing Screening Panggilan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	812	Pengujian Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Bidang Teknis

4

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	813	Pengangkatan Calon Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat pelaksanaan fungsi dan mengganggu tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pengangkatan calon pegawai Gol. I				
	.2	Pengangkatan calon pegawai Gol. II				
	.3	Pengangkatan calon pegawai Gol. III				
	.4	Pengangkatan calon pegawai Gol. IV				
	.5	Pengangkatan calon guru INPRES				
	814	Pengangkatan Tenaga Lepas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugasPerangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pengangkatan tenaga bulanan/ Tenaga Kontrak				
	.2	Pengangkatan tenaga harian				
	.3	Pengangkatan tenaga pensiunan				
	815	-	-	-	-	-
	816	-	-	-	-	-
	817	-	-	-	-	-
3	820	MUTASI				
		Meliputi : Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan Pelimpahan data sering, Tugas belajar, Wajib militer				
	821	Pengangkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Tetap				
	.11	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan I				
	.12	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan II				
	.13	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan III				
	.14	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan IV				

4

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.15	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang cuti di luar tanggungan negara				
	.2	Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan Berita Acara serah terima jabatan				
	.21	Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag/Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala				
	.22	Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/ Asisten Sekwilda Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala				
	.23	Bidang/Inspektur Pembantu Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Sub				
	.24	Bidang/Pemeriksa				
	.25	Residen/pembantu Gubernur				
	.26	Wedana/pembantu Bupati				
	.27	Camat				
	.28	Lurah Administratif (Lurah Desa)				
	.29	Jabatan Lainnya				
	822	Kenaikan gaji berkala	Terbatas	Eselon III	tugas Organisasi Perangkat dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pegawai golongan I				
	.2	Pegawai golongan II				
	.3	Pegawai golongan III				
	.4	Pegawai golongan IV				
	823	Kenaikan pangkat/ pengangkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pegawai golongan I				
	.2	Pegawai golongan II				
	.3	Pegawai golongan III				
	.4	Pegawai golongan IV				

+

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
824	Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1 Pegawai golongan I					
	.2 Pegawai golongan II					
	.3 Pegawai golongan III					
	.4 Pegawai golongan IV					
	.5 Lolos Butuh					
	.6 Kurikulum dan Silabus					
825	Proposal (TOR)		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
Datasering dan Penempatan Kembali						
826	Penunjukkan Tugas Belajar		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1 Dalam Negeri					
	.2 Luar Negeri					
	.3 Tunjangan Belajar					
827	.4 Penempatan kembali		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
Wajib militer						
828	Mutasi dengan instansi lain		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
829	-		-	-	-	-

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	830	KEDUDUKAN				
		Meliputi: Penghitungan masa kerja, Penyesuaian pangkat/gaji, Penghargaan ijazah dan jenjang pangkat				
	831	Penghitungan masa kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	832	Penyesuaian pangkat/gaji	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pegawai golongan I				
	.2	Pegawai golongan II				
	.3	Pegawai golongan III				
	.4	Pegawai golongan IV				
	833	Penghargaan ijazah / Penyesuaian ijazah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	834	Jenjang Pangkat / Eselonering			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	835	-	-	-	-	-
	836	-	-	-	-	-
	837	-	-	-	-	-
5	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI				
		Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan				

✶

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		keschatan, Koperasi, Distribusi, Perumahan/tanah, Bantuan sosial, Rekreasi dan Dispensasi				
	841	Tunjangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Jabatan				
	.2	Kehormatan				
	.3	Kematian / Uang duka				
	.4	Tunjangan hari raya				
	.5	Perjalanan dinas tetap/cuti/pindah				
	.6	Keluarga				
	.7	Pangan, Sandang , papan (Bapetarum)				
	842	Dana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Taspen				
	.2	Kesehatan				
	.3	Asuransi				
	843	Perawatan Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Poliklinik				
	.2	Perawatan dokter				
	.3	Obat-obatan				
	.4	keluarga Berencana				
	844	Koperasi/Distribusi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Distribusi Pangan				
	.2	Distribusi Sandang				
	.3	Distribusi Papan				
	845	Perumahan /Tanah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis
	.1	Perumahan pegawai				

4

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.2	Tanah kapling			dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	.3	Losmen/hotel				
	846	Bantuan sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Bantuan Kebakaran				
	.2	Bantuan kebanjiran				
	847	-	-	-	-	-
	848	-	-	-	-	-
	849	-	-	-	-	-
6	850	CUTI				
		Meliputi: Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti hamil, Cuti naik haji, Cuti di luar Tanggungan negara dan Cuti Alasan penting/alasan lainnya				
	851	Cuti tahunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	852	Cuti besar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	853	Cuti sakit	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

4

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	854	Cuti hamil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	855	Cuti naik haji/ Umroh	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	856	Cuti di Luar Tanggungan Negara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	857	Cuti Alasan Penting/ Cuti alasan lain	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	858	-	-	-	-	-
	859	-	-	-	-	-
7	860	PENILAIAN				
		Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian dinas, Penilaian kekayaan pribadi, dan Rehabilitasi				
	861	Penghargaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Bintang/ Satyalencana				
	.2	Kenaikan pangkat anumerta				
	.3	kenaikan gaji istimewa				
	.4	Hadiah berupa uang				

4

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.5 862	Pegawai Teladan Hukuman	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah Kota Bima	Bidang Teknis
	.1	Teguran Peringatan				
	.2	Penundaan kenaikan gaji				
	.3	Penurunan pangkat				
	.4	Pemindahan				
	Catatan: Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan terhormat lihat 887 dan 888					
863	Kondite, DP3, Disiplin Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
864	Ujian dinas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
	.1 .2 .3	Tingkat I Tingkat II Tingkat III				
865	Penilaian kehidupan pegawai Negeri. Meliputi : Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, kekayaan pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
866	Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
867	-	-	-	-	-	-

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	868	-	-	-	-	-
	869	-	-	-	-	-
8	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN				
		Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi,				
		Daftar riwayat hidup, Hak, Pengajian, Sumpah/janji, dan Korps pegawai				
	871	Formasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	872	Bezetting/ Daftar Urut Kepegawaian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	873	Registrasi NIP	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	KARPEG				
	.2	Legitimasi/Tanda pengenalan				
	.3	Daftar keluarga /kp4, Perkawinan, Perceraian, Karis/ Karsu				
	.4					
	874	Daftar Riwayat Pekerjaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Tanggal lahir				
	.2	Penggantian Nama				
	.3	Izin Kepartaian organisasi				
	875	Kewenangan Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis
	.1	Pelimpahan wewenang				

7

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.2	Specimen tanda tangan			dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	876	Penggajian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	SKPP				
	877	Sumpah/Janji pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	878	Koprs Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	879	-	-	-	-	-
9	880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI				
		Meliputi: Atas Pemberhentian, Permintaan sendiri, Dengan hak pensiun, Karena meninggal dunia, Alasan lain, Dengan diberi uang pesangon, Uang tunggu untuk sementara waktu, dan pemberhentian tidak dengan hormat				
	881	Permintaan sendiri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	882	Dengan Hak Pensiun	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

1

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	1. Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Pegawai Negeri Gol. I 2. Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Pegawai Negeri Gol. II 3. Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Pegawai Negeri Gol. III 4. Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Pegawai Negeri Gol. VI 5. Pensiun Janda/duda 6. Pensiun Yatim Piatu 7. Uang muka Pensiun				mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	883. Karena meninggal 1. Karena Meninggal dalam tugas		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	884. Alasan lain		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	885. Uang pesangon		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	886. Uang Tunggu		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	887	Untuk sementara waktu	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah	Bidang Teknis
	888	Tidak dengan hormat	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah	Bidang Teknis
	889	-	-	-	-	-
10	890	PENDIDIKAN PEGAWAI				
		Meliputi: Perencanaan, Pendidikan reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Luar negeri, Metode, Tenaga pengajar, Administrasi pendidikan, Fasilitas sarana pendidikan				
	891	Perencanaan Program	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Kurikulum dan Silabi				
	.2	Proposal (TOR)				
	.3					
	892	Pendidikan reguler / Kader IPDN/APDN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Kursus-Kursus Reguler				
	.2					
	893	Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler LEMHANAS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMA, ADUMLA, ADUM				
	.2	Kursus-Kursus / Penataran				
	.3	Diklat Teknik, Fungsional dan Manajemen				
	.4	Pemerintahan				

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.5	Diklat lainnya				
894	Pendidikan Luar negeri		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1	Berkesinambungan/berkala /bergelar					
.2	Non Gelar/ Diploma					
895	Metode		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1	Kuliah					
.2	Ceramah,simposium					
.3	Diskusi, raker, seminar, lokakarya, orientasi					
.4	Studi lapangan,KKN, Widyawisata					
.5	Tanya Jawab, Silabi, Modul, Kursil					
.6	Penugasan					
.7	Gladi					
896	Tenaga pengajar/Widyaiswara/Nara sumber		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1	Moderator					
897	Administrasi pendidikan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1	Tahun pelajaran					
.2	Persyaratan,meliputi pendaftaran, testing, ujian					
.3	STTP					
.4	Penilaian Angka Kredit					
.5	Laporan pendidikan dan Pelatihan					
898	Fasilitas Belajar		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1	Tunjangan belajar					
.2	Asrama					

1

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.3 .4 .5 .6 .7 .8	Uang makan Uang Transport Uang buku Uang Ujian Uang Semester / Uang kuliah Uang saku				
	899 .1 .2 .3	Sarana Bantuan sarana belajar Bantuan alat-alat tulis Bantuan sarana belajar lainnya	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

K. KEUANGAN

NO	KLASIFIKASI	J E N I S	A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2		3	4	5	6	7
1	900	KEUANGAN					
	901	Nota keuangan		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia Daerah Kota Bima	Bidang Teknis
	902	APBN		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	903	APBD		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	904	APBN-P		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	905	Dana Alokasi Umum		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

1

NO	KLASIFIKASI	J E N I S	A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	906	Dana Alokasi Khusus	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
	907	Dekonsentrasi (Pelimpahan dana dari pusat ke daerah)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
	908	-	-	-	-	-	
	909	-	-	-	-	-	
2	910	ANGGARAN					
	911	Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
	912	Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
	913	Anggaran Belanja Tambahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
	914 .1	Daftar Isian Kegiatan (DIK) Daftar Usulan Kegiatan (DUK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	

X

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	915	Daftar Isian Proyek (DIP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Daftar Usulan Proyek (DUP)				
	.2	Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)				
	916	Revisi Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	917		-	-	-	-
	918		-	-	-	-
	920	OTORISASI/SKO				
3	921	Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	922	Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	924	Ralat SKO	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	925		-	-	-	-
	926	-	-	-	-	-

8

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	927	-	-	-	-	-
4	930	VERIFIKASI				
	931	S.P.M Rutin (Daftar P80)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	932	S.P.M Pembangunan (Daftar P80)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	933	Penerimaan (Daftar P6, P7)		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	934	SPJ Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	935	SPJ Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	936	Nota Pemeriksaan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah Kota Bima	Bidang Teknis

8

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	937	SP Pemindahan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	938	-	-	-	-	-
	939	-	-	-	-	-
5	940	PEMBUKUAN				
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	943	Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	944	-	-	-	-	-
	945	-	-	-	-	-
6	950	PERBENDAHARAAN				
	951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					mengganggu pelaksanaan fungsi dan Tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	953	Penghapusan Kekayaan Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan Tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek dan Pengangkatan /Pemberhentian Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	955	Spesimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	957	-	-	-	-	-
	958	-	-	-	-	-
	959	-	-	-	-	-
7	960	PEMBINAAN KEBENDAHAARAN				
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendahara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	963	Laporan Keuangan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	964	-	-	-	-	-
	965	-	-	-	-	-
	966	-	-	-	-	-
8	970	PENDAPATAN				
	971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	972	Subsidi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	974	Retribusi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	975	Bea	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	976	Cukai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	977	Pungutan /PNBP	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	978	Bantuan Presiden, Menteri, dan Bantuan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	979		-	-	-	-
	980		-	-	-	-
	981		-	-	-	-
	990	BENDA HARAWAN				
9	991	SKPP/SKPPS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	J E N I S	A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	993	-	-	-	-	-	
	994	-	-	-	-	-	
	995	-	-	-	-	-	
	996	-	-	-	-	-	
	997	-	-	-	-	-	
	998	-	-	-	-	-	
	999	-	-	-	-	-	

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

7